



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram  
Website: [www.dprd-ntbprov.go.id](http://www.dprd-ntbprov.go.id)

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 28/KEP.DPRD/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa Program Pembentukan Perda merupakan instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 Desember 2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :
- a. 15 (lima belas) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - b. 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tersedia di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 10 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

K E T U A,



**H. BAIQ ISVIE RUPAEDA**

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 28/KEP.DPRD/ 2024

TANGGAL : 10 DESEMBER 2024

DAFTAR 15 (LIMA BELAS) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
**USUL PRAKARSA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KET.
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bapemperda	Luncuran
2.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Bapemperda	Luncuran
3.	Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan	Komisi IV DPRD Prov. NTB	Luncuran
4.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	Bapemperda	Luncuran
5.	Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan	Bapemperda	Luncuran
6.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Bapemperda	Luncuran
7.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi	Bapemperda	Luncuran
8.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Bapemperda	Luncuran
9.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B	Bapemperda	Luncuran
10.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi	Komisi I DPRD Prov. NTB	Baru

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
11.	Raperda tentang Pengendalian Tenaga Kerja Asing dan Perlindungan Tenaga Kerja Asal Nusa Tenggara Barat	Bapemperda	Baru
12.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Bapemperda	Baru
13.	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Judi Online, Pinjaman Online dan Pinjaman Illegal (Rentenir)	Anggota DPRD (H. Didi Sumardi, SH)	Baru
14.	Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Sumbangan dan Partisipasi Masyarakat di Sekolah	Anggota DPRD (H. Didi Sumardi, SH)	Baru
15.	Raperda tentang Zonasi Tambang Rakyat	Komisi IV DPRD Provinsi NTB	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

K E T U A,  
  
**HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 28/KEP.DPRD/ 2024  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2024

DAFTAR 8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
**USUL PRAKARSA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**  
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

NO.	JUDUL RAPERDA	KET.
1.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Baru
2.	Raperda tentang Rencana Perlindungan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2045	Baru
3.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah	Luncuran
4.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Baru
5.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Baru
6.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025	Baru
7.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Baru
8.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,  
K E T U A,



**H.I. BALQ ISVIE RUPAEDA**